

NASKAH PUBLIKASI (*MANUSCRIPT*)

**ANALISIS PENGARUH MODERNISASI MILITER CHINA
ERA PEMERINTAHAN XI JINPING TERHADAP KOMPLEKSITAS
KEAMANAN DI ASIA TIMUR**

***ANALYSIS OF THE EFFECT OF CHINA MILITARY MODERNIZATION ERA
OF XI JINPING GOVERNMENT TO THE SECURITY COMPLEXITY IN EAST
ASIA***

ANDI FITRIA NUUR KHASANAH¹, KHOIRUL AMIN, S.IP., M.A²



OLEH:

ANDI FITRIA NUUR KHASANAH

1811102434014

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2022

Naskah Publikasi (*Manuscript*)

**Analisis Pengaruh Modernisasi Militer China
Era Pemerintahan Xi Jinping terhadap Kompleksitas Keamanan di Asia Timur**

*Analysis of The Effect of China Military Modernization Era of Xi Jinping
Government to The Security Complexity in East Asia*

Andi Fitria Nur Khasanah¹, Khoirul Amin, S.IP., M.A²



Oleh:

Andi Fitria Nur Khasanah

1811102434014

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi, Bisnis Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PENGARUH MODERNISASI MILITER CHINA
ERA PEMERINTAHAN XI JINPING TERHADAP KOMPLEKSITAS
KEAMANAN DI ASIA TIMUR**

*(Analysis of the Effect of China Military Modernization
Era of Xi Jinping Government to the Security Complexity in East Asia)*

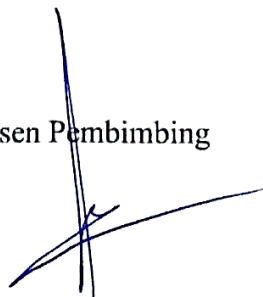
Diajukan oleh

Andi Fitria Nur Khasanah
1811102434014

Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Pada hari Kamis, 29 Juni 2022

Dosen Pembimbing


Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN: 111511 9001

LEMBER PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
ANALISIS PENGARUH MODERNISASI MILITER CHINA
ERA PEMERINTAHAN XI JINPING TERHADAP KOMPLEKSITAS
KEAMANAN DI ASIA TIMUR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANDI FITRIA NUUR KHASANAH
1811102434014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi dan dinyatakan
LULUS

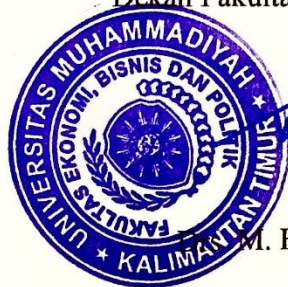
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1)
Ilmu Hubungan Internasional
Pada hari, Kamis, 29 Juni 2022
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

2. Khoirul Amin, S.IP., M.A
3. Devy Indah Paramitha, S.IP., M.Han

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Politik



()

M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D

**Analisis Pengaruh Modernisasi Militer China
Era Pemerintahan Xi Jinping terhadap Kompleksitas Keamanan di Asia Timur**

Andi Fitria Nuur Khasanah

**Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**

E-mail: andifitriaenkhaza26@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi militer China pada era pemerintahan Xi Jinping terhadap kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur. Dengan menggunakan teori keamanan regional yang digagas oleh Buzan dan Weaver, tulisan ini menjelaskan secara komprehensif bagaimana modernisasi militer China memberikan respon terhadap negara-negara di kawasan serta pengaruh dalam variabel-variabel pembentuk RSC. Pengembangan modernisasi militer China sebagai misi untuk mewujudkan militer kelas dunia berimplikasi terhadap struktur anarki di kawasan dimana secara tidak langsung mengubah lanskap keamanan yang telah terbentuk selama beberapa dekade semenjak kepemimpinan Xi Jinping. Struktur bipolar yang menguat disebabkan oleh penetrasi kekuatan dari luar kawasan dan negara-negara *great power* menghasilkan persaingan antara dua kutub kekuatan di kawasan yakni persaingan kekuatan militer China-Jepang. Pola permusuhan dan aliansi antar negara-negara kawasan yang semakin menguat membuat kawasan Asia terus menjadi kawasan yang selalu dinamis. Kebangkitan modernisasi militer China menambah daftar panjang bagi anarkisme kawasan dan menyebabkan dilema keamanan bagi negara-negara di sekitar kawasan tersebut sehingga menghasilkan tren keamanan regional baru.

Kata Kunci: *RSCT, Keamanan Regional, Asia Timur, Modernisasi Militer China*

ABSTRACT

This paper aims to analyze the influence of China's military modernization in the era of Xi Jinping's administration on security complexities in the East Asia region. By using the regional security theory by Buzan and Weaver, this paper comprehensively describes how China's military modernization responds to countries in the region and its influence on the variables forming the RSC. The development of China's military modernization as a mission to create a world-class military has implications for the anarchic structure in the region, which indirectly changes the security landscape that has formed over the decades since Xi Jinping's leadership. The strengthening bipolar structure is caused by the penetration of power from outside the region and great power countries, resulting in competition between the two poles of power in the region, which

is the competition for military power between China and Japan. The pattern of hostility and alliances between regional countries that are getting stronger makes the Asian region continue to be dynamic. The rise of China's military modernization adds to the long list of regional anarchisms and creates security dilemmas for the countries around the region, thereby generating new regional security trends.

Keywords: *RSCT, Regional Security, East Asia, China Military Modernization*

PENDAHULUAN

Babak baru modernisasi militer China dimulai dengan keberhasilan Xi Jinping dalam memuat kebijakan *open door policy* dengan menerapkan reformasi pasar terbuka secara lebih luas bagi investor dan perusahaan asing, membuat China mengalami peningkatan ekonomi yang cukup signifikan. China menjadi negara yang memiliki PDB terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dan menjadi salah satu pusat perbankan internasional (Caleb, 2022), sementara menurut prediksi CEBR (*Centre for Economics and Business Research*), China telah menetapkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5.7% dari tahun 2021-2025 dan pada saat ini menempati negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Hal tersebut akhirnya mendorong China dalam meningkatkan kapasitasnya khususnya dalam pengembangan militer sebagai strategi jangka panjang China dalam memperluas kekuatan nasionalnya, menggantikan aliansi dan kemitraan keamanan Amerika Serikat di kawasan dan merevisi tatanan internasional agar lebih menguntungkan bagi sistem otoriter Beijing dan kepentingan nasionalnya (DoD 2021, p.1). Sebagai salah satu upaya menggeser posisi AS sebagai satu-satunya hegemon, modernisasi militer dalam rangka memenangkan *war of position* terhadap Amerika oleh Xi Jinping juga semakin diperkuat (Rafsanjani 2020, p.27)

Kebijakan modernisasi yang dilakukan Xi Jinping menunjukkan eksistensi dan pengaruh negara tersebut baik di tingkat regional maupun internasional. Xi Jinping menunjukkan komitmennya melalui pernyataannya di Kongres Nasional ke-19 PKC (Partai Komunis China) pada Oktober 2017 dengan menetapkan tolak ukur untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan strategi rezim perdamaian dengan membuat beberapa prioritas seperti mendorong upaya reformasi militer dibanding para pendahulunya, menyelesaikan modernisasi PLA (*People's Liberation Army*) pada tahun 2035 dan menjadikannya sebagai kekuatan militer kelas dunia pada tahun 2049 (Maizland, 2020). Hal ini menunjukkan ambisi yang kuat oleh China untuk menjadi kekuatan adidaya yang tentunya dapat mengancam keamanan negara-negara di kawasan Asia Timur. Modernisasi militer China didasari oleh tiga buah pilar reformasi dan modernisasi PLA. Pilar pertama adalah melaksanakan pembangunan, pengadaan, akuisisi sistem persenjataan modern dan peningkatan teknologi militer. Pilar kedua adalah reformasi sistem dan Institusi yang bertujuan untuk menciptakan profesionalisme di dalam tubuh angkatan bersenjata China. Terakhir, pilar ketiga adalah

pembangunan doktrin dan strategi perang yang baru dengan mempersiapkan pertempuran dengan senjata berteknologi tinggi (Purwanto, 2010).

Dalam upaya modernisasi militer, Xi Jinping melakukan reformasi besar-besaran melalui PLA dengan menciptakan struktur komando dan kontrol yang baru dengan mengganti sistem komando regional dengan sistem komando teater, membentuk pasukan pendukung strategis, meningkatkan pelatihan dan pengkaderan bagi pasukan militer, serta melakukan kolaborasi dengan latihan bersama (Dod 2021, p.3). Melalui kolaborasi ini, PLA diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya baik dalam bidang sains dan teknologi sehingga militer China mampu memasuki tahap intelegensi dan siap untuk masuk dalam medan perang yang lebih modern. Perubahan ini menjadi langkah awal untuk membentuk fondasi yang penting bagi kemampuan tempur PLA, Xi Jinping diyakini mampu menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan kontroversial yang pada akhirnya menguntungkan efektivitas operasional PLA. Hasilnya, dengan berbagai gebrakan modernisasi militer China terbentuknya militer yang lebih terorganisir dalam mengimplementasikan kebijakan China di dalam negeri dan di kawasan.

Di kawasan Asia Timur, pengaruh dari upaya modernisasi militer China terus menunjukkan efek yang signifikan sehingga menunjukkan sejumlah tren keamanan regional yang meningkat sejak tahun 2014 terkait dengan sengketa wilayah maritim, ketegasan strategis China, proliferasi nuklir, serta pembangunan militer di kawasan (Duchâtel & Mathieu 2016, p.261). Upaya China tersebut secara aktif membentuk dinamika keamanan regional dengan melihat peningkatan tren belanja militer dalam kawasan tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) anggaran belanja militer di kawasan tersebut menunjukkan grafik yang meningkat dari 323.324 Miliar USD pada tahun 2013 menjadi 428.861 Miliar USD pada tahun 2020. Ketegangan di kawasan yang terus meningkat menunjukkan semakin kompleksnya hubungan keamanan antar negara di kawasan. Kekhawatiran pembangunan militer, sengketa wilayah maritim, serta ketegasan strategis China yang terjadi terus memberikan ketegangan secara regional. Tren pengeluaran militer negara-negara di kawasan Asia Timur menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah dan konflik dengan

China telah meluncurkan program modernisasi militernya sehingga kompleksitas keamanan Asia Timur tidak terelakkan lagi.

Walaupun dalam berbagai macam kesempatan pemerintah China terus menekankan bahwa upaya modernisasi militer tersebut adalah salah satu bentuk dari upaya China untuk melindungi negaranya baik dari ancaman kedaulatan maupun ancaman keamanan, namun upaya tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara khususnya di kawasan Asia Timur. Menarik untuk dibahas berdasarkan latar belakang tersebut dengan melihat ambisi dari peningkatan militer China dan negara-negara di kawasan Asia Timur dalam modernisasi militer China di bawah masa pemerintahan Xi Jinping menunjukkan interkoneksi bagi kompleksitas keamanan kawasan yang perlu dijabarkan secara lebih komprehensif melalui komponen-komponen penyusun kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur.

Dalam penelitian ini, penulis akan berupaya untuk memberikan analisis yang lebih sistematis dengan berfokus terhadap kebijakan modernisasi selama kebijakan di masa pemerintahan Xi Jinping untuk memahami bagaimana pengaruhnya bagi kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur. Hal ini tentu menarik mengingat penguatan kebijakan dari modernisasi di masa pemerintahan Xi Jinping terus mengalami reformasi dan komitmen untuk bangkit dan menjadi salah satu kekuatan di kawasan tersebut sehingga diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam kajian Keamanan Internasional.

RSCT (*REGIONAL SECURITY COMPLEX THEORY*)

Penting untuk memahami secara lebih rinci RSCT (*Regional Security Complex Theory*) atau teori kompleksitas keamanan kawasan. Desentralisasi keamanan dunia pasca Perang Dingin tidak dapat dipungkiri telah membawa kawasan-kawasan menentukan arahnya sendiri. Dalam tulisannya, Buzan dan Waever mendefinisikan bahwa setiap kawasan pasti memiliki keidentikan pada masalah keamanan sehingga menghasilkan interdependensi hingga menjadi fondasi terbentuknya suatu kompleksitas keamanan di kawasan. Pemahaman mengenai RSCT ini telah dijelaskan lebih mendalam oleh Buzan dan Weaver (2003) yakni:

“...a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another.”

Barry Buzan menjelaskan bahwa proses sekuritisasi maupun desekuritisasi suatu negara merupakan proses interaksi terhadap keamanan negara lain. Dengan demikian, untuk memahami bagaimana kompleksitas keamanan kawasan bekerja, tidak cukup hanya dengan memahami keamanan satu negara saja, tetapi juga harus memahami keamanan negara lain, keamanan negara dalam kawasan dan interaksi keamanan negara-negara tersebut. Terdapat juga beberapa aspek lain yang berpengaruh dalam pembentukan kompleksitas keamanan kawasan, yaitu kondisi keamanan domestik yang tidak stabil, interaksi antar kawasan dan juga peran kekuatan global. Dengan memahami berbagai aspek tersebut maka kompleksitas keamanan kawasan bisa dijabarkan secara utuh dan komprehensif.

Agar dapat membedakan keamanan global dan keamanan kawasan, setidaknya terdapat beberapa cakupan proyeksi kekuatan negara, apakah dapat diperhitungkan atau tidak. Proyeksi kekuatan ini berkaitan dengan distribusi kekuatan yang berlangsung dari tingkat global hingga kawasan. Buzan mengidentifikasi struktur kekuatan ini dengan membaginya menjadi tiga kategori, yakni: (1) *super power*, (2) *great power*, (3) *regional power* (Buzan & Weaver 2003, p.37).

Istilah *super power* digunakan untuk aktor yang memiliki pengaruh yang kuat baik dalam tingkat global maupun regional melalui kapabilitas politik, ekonomi, dan militer yang sangat luas, dalam hal ini AS sebagai kekuatan utama dengan kemampuan memproyeksikan kekuatan dan ideologinya di seluruh belahan dunia. Di level berikutnya ada *great power*, dimana aktornya memiliki kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang dipandang berpotensi untuk menyaingi *superpower* di masa depan seperti Uni Eropa, China, Rusia, dan Jepang. Terakhir, *regional power* dimana sebuah entitas harus diperhitungkan dalam lingkup kawasan untuk mendefinisikan polaritas dengan fokus kekuatan di kawasan seperti China yang memiliki peranan penting di kawasan Asia yang berpusat pada satu *regional power* di kawasan tersebut. Melihat desentralisasi keamanan global ke kawasan, maka kekuatan *super power* dan *great power* memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi konstelasi keamanan di level kawasan dalam hal ini adanya Amerika, China, dan Jepang yang hadir dalam

kawasan Asia Timur membuat terbentunya dinamika kompleks keamanan kawasan tersebut (Buzan and Waever 2003, p. 53).

Menurut teori regionalisme, fungsi RSCT adalah sebagai kerangka kerja yang mengatur studi empiris bagi keamanan regional. Terdapat dua macam tujuan yang dikembangkan dari teori tersebut yakni RSCT deskriptif dan RSCT prediktif. Salah satu tujuan RSCT deskriptif adalah menetapkan tolok ukur untuk mengidentifikasi dan menilai perubahan di tingkat regional, sementara RSCT prediktif merupakan kelanjutan dari RSCT deskriptif yang bertujuan untuk menemukan perubahan yang mungkin terjadi dalam RSCT dan memberikan skenario baru dalam kompleks keamanan kawasan. Teori ini menentukan hal yang harus dicari pada empat tingkat analisis dan bagaimana menghubungkannya. Keempat level tersebut adalah: isu keamanan negara-negara dalam kawasan, hubungan antar negara-negara dalam kawasan, interaksi kawasan dengan daerah tetangganya, serta peran kekuatan global di kawasan dengan adanya interaksi antara struktur keamanan global dan regional (Buzan and Waever 2003, p. 54).

Melalui RSCT deskriptif, kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur dapat dipahami dengan mengurai kerumitan antara hubungan dari seluruh variabel. Dengan menggunakan konsep RSCT sebagai kerangka untuk menganalisa pengaruh modernisasi militer China bagi dinamika keamanan kawasan Asia Timur, maka penulis memetakan secara garis besar terhadap variabel-variabel tersebut.

A. *Boundary*

Variabel tentang batas ini menjelaskan bagaimana perbedaan kompleksitas yang dihadapi masing masing negara yang berada dikawasan. *Boundary* merupakan sebuah batas yang mengacu pada batas fisik yakni batas geografi (Buzan and Waever 2003, p. 67). Pada variabel ini, penulis akan menentukan batasan-batasan geografis dari China terhadap Asia Timur sebagai variabel yang menentukan kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur. Kemungkinan dari adanya dinamika keamanan dapat dilihat dalam variabel ini, serta adanya pengaruh-pengaruh eksternal dari batas wilayah kawasan satu sama lain di negara-negara sekitar kawasan dapat diidentifikasi melalui variabel tersebut. China merupakan negara terbesar di Asia Timur yang berbatasan langsung dengan Mongolia, Korea Utara, Korea

Selatang dan Jepang. Sementara Taiwan di lepas pantai timur Cina, memiliki pemerintahan independen yang telah terpisah dari daratan Cina setelah Perang Dunia II.

B. *Anarchic Structure*

Struktur anarki merupakan salah satu aspek penting dalam pembentuk kompleksitas keamanan kawasan adalah anarkisme kawasan. Anarkisme kawasan ditunjukkan dengan tidak adanya otoritas yang berwenang dalam proses penyelesaian secara damai apabila terjadi konflik di antara negara-negara kawasan tersebut. Anarkisme kawasan juga mengakibatkan minimnya dialog dan proses komunikasi dalam bentuk kerjasama atau perjanjian bilateral maupun multilateral sehingga mengakibatkan tingginya kecurigaan antarnegara yang terlibat (Buzan and Waever 2003, p. 63). Variabel dari struktur anarki mengukur tingkat anarkisme yang terjadi dengan melihat aktor-aktor utama yang menyebabkan adanya struktur anarki tersebut. Dalam hal ini, ketiadaan rezim perdamaian dalam kawasan Asia Timur menjadi problematika tersendiri bagi kawasan tersebut, yang menandai adanya kompetisi perlombaan senjata dan nuklir sebagai upaya perlindungan keamanan untuk menyeimbangkan kekuatan dari negara-negara lain di kawasan tersebut. Ketidakhadiran institusi regional di Asia Timur pada akhirnya memperlambat interaksi kooperatif antara negara-negara di dalamnya.

C. *Polarity*

Polaritas merujuk pada adanya kutub kekuatan di dalam sebuah sistem internasional atau kawasan dimana kekuatan tersebut memiliki magnet bagi negara disekitarnya untuk membentuk aliansi. Dalam kondisi keamanan regional, polaritas terbagi menjadi unipolar, bipolar, dan multipolar (Buzan and Waever 2003, p. 53). Dalam RSCT, skema polaritas bisa berubah sesuai dengan kondisi power masing-masing negara dalam kawasan. Power negara yang dimaksud dalam polaritas ini pada dasarnya merujuk pada kapabilitas militer suatu negara, akan tetapi dalam tulisan ini dapat pula ditambahkan power dalam hal yang lain seperti kekuatan religiusitas suatu negara dan kekuatan ekonomi sehingga power yang dimiliki oleh suatu negara dalam suatu kawasan pasti akan memunculkan berbagai macam kemungkinan, pertama negara lain akan melihat hal tersebut sebagai suatu ancaman dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya, yang kedua adalah, negara yang tidak mampu untuk mengimbangi power tersebut memilih untuk bekerjasama atau beraliansi dengan negara yang memiliki power yang lebih besar. Hal ini yang kemudian membentuk

polaritas dalam satu kawasan. Dikatakan unipolar jika ada satu negara dalam satu kawasan memiliki kapabilitas yang paling tinggi diantara negara tetangganya, dan dikatakan sebagai multipolar saat ada dua atau lebih negara memiliki kapabilitas yang hampir sama.

D. *Social Construction*

Variabel konstruksi sosial ini meliputi pola hubungan *amity* dan *enmity* diantara negara negara yang berada dalam kawasan. *Amity* adalah hubungan yang dibangun berdasar pada rasa percaya, persahabatan, dan kerjasama. Hubungan yang baik ini bisa terjalin saat negara-negara dalam kawasan menghadapi isu yang sama dan sepakat untuk melakukan kerjasama. Hubungan yang dibangun dengan rasa kepercayaan, Kerjasama, dan persahabatan dapat membawa negara-negara yang ada di kawasan tersebut dalam rasa yang aman. Sedangkan *enmity* adalah hubungan yang dibangun berdasar pada permusuhan dan rasa curiga satu sama lain. Enmity dalam suatu kawasan bisa dilihat melalui sejarah konflik dan benturan kepentingan yang mendominasi pola hubungan yang terjalin. Perubahan kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata oleh negara merupakan salah satu respon atas hubungan yang tidak baik atau hubungan yang berdasarkan rasa curiga (Buzan and Waever 2003, p. 50).

Melalui keempat variabel diatas, modernisasi militer China merupakan salah satu isu keamanan yang banyak disorot oleh negara-negara dalam kawasan Asia Timur dengan menunjukkan kesiapan China untuk menghadapi perang yang lebih modern dengan senjata berteknologi tinggi, hal ini tentunya dapat mengancam siapapun yang menjadi rival China dan memiliki konflik sengketa dengan negara tersebut. Ketiadaan struktur anarki di kawasan Asia Timur menjadikan modernisasi militer China menjadi salah satu kekhawatiran bagi negara kawasan dengan ketiadaan institusi regional yang mampu menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi, sangat dimungkinkan bagi China untuk menggunakan kekuatan militer dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sengketa wilayah maupun penyelesaian konflik lainnya. Kemampuan militer Cina membentuk suatu dilemma apakah peningkatannya berlangsung damai atau mengancam stabilitas keamanan (Bader, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif dengan menggunakan analisis data secara induktif dimana penelitian ini berangkat melalui teori khusus yang memiliki batasan eksklusif dan pada akhirnya diuji ke dalam fenomena

ataupun kronologi yang umum (Jujun, 2006). Data yang digunakan adalah data kualitatif, informasi-informasi tentang fenomena disimbolkan dengan kata-kata yang berorientasi pada makna dan hubungan antarvariabel yang membentuk suatu fenomena. Perlu diketahui bahwa unit eksplanasi atau *variabel independen* adalah obyek yang mempengaruhi unit analisa yakni Modernisasi Militer China di masa pemerintahan Xi Jinping, sementara unit analisa atau yang disebut juga *variabel dependen* merupakan sebuah obyek yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas dalam hal ini yakni kawasan Asia Timur. Adapun tingkat analisa dalam penelitian ini adalah analisa model reduksionis yaitu unit eksplanasinya lebih rendah tingkatannya daripada unit analisa.

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka. Dalam teknik pengumpulan data penulis akan mengeksplorasi data yang sesuai dengan pembahasan tentang modernisasi militer China dan dinamika keamanan kawasan di Asia Timur. Dalam metode ini, dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang ada serta berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari berbagai buku atau literature, dokumen, jurnal, artikel, maupun informasi dari media cetak lainnya yang relevan dengan masalah-masalah yang diamati. Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan kedalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan sistematika penulisan.

PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, variabel RSCT diperlukan dalam menganalisis sikap dan respon negara-negara di kawasan serta mengetahui adanya penetrasi kekuatan dari luar kawasan terkait modernisasi militer China yang turut menambah dinamika di kawasan Asia Timur. RSCT juga menjelaskan beberapa kondisi yang terbentuk dari pola hubungan *amity* dan *enmity* serta hubungan erat dari interaksi antarnegara dalam aspek keamanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam memahami kompleksitas kawasan yang terjadi di Asia Timur maka penulis akan membagi pembahasan tersebut menjadi empat sub-pembahasan. Kemudian pengaruh dari modernisasi militer China akan dijelaskan dengan melihat perubahan ataupun pergeseran yang terjadi terhadap keempat variabel tersebut antara

lain *Boundary* (batasan geografis), *Anarchic Structure* (struktur anarki), *Polarity* (polaritas), dan *Social Construction* (konstruksi sosial).

A. *Boundary*

Variabel pertama merupakan penentu batasan geografis antara RSC Asia Timur dengan RSC di luar kawasan lain, maka penting untuk memetakan variabel tersebut dari batas-batas geografis yang telah ditentukan. Batasan geografis membantu untuk menentukan sejauh mana modernisasi militer China mempengaruhi negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Timur. Menurut Barry Buzan, dinamika keamanan Asia Timur telah banyak mengalami proses transformasi selama Perang Dingin dan pasca Perang Dingin. Dalam tingkat antar wilayah, pergeseran dramatis yang terjadi adalah penggabungan RSC Timur Laut dan Asia Tenggara menjadi RSC Asia Timur, seiring dengan kekhawatiran dari kebangkitan politik dan militer China sehingga perkembangan ini mengubah struktur level melalui proses transformasi eksternal yang menggabungkan dua RSC menjadi satu dan menghasilkan superkompleks di Asia (Buzan & Weaver 2003, p.107).

Sementara bagi RSC Asia Timur sendiri, dinamika keamanan antar kawasan memang terfokus pada China terutama karena kekuatan militer-politiknya, tidak sulit untuk membayangkan bahwa kekuatan China berkembang ke arah skenario agresif sehingga RSC Asia Timur dapat dengan mudah menjadi formasi konflik. Kondisi dan wilayah geografis yang saling berdekatan dan berbatasan satu sama lain menjadikan negara-negara tersebut mengalami isu-isu keamanan seperti, perselisihan teritorial, persaingan status, ketakutan, dan permusuhan oleh faktor sejarah. Sulit untuk menemukan bahwa terdapat dua negara yang berdekatan di kawasan yang mustahil tidak memiliki masalah keamanan di antara mereka serta mengalami proses aktif sekuritisasi bersama dalam satu kawasan. Mengingat bahwa kawasan Asia Timur menjadi kawasan strategis di mana terdapat kepentingan negara-negara *great power* yakni Cina dan Jepang, serta negara di Semenanjung Korea yang saling memberikan pengaruh yang besar.

Hingga saat ini menurut *National Online Project*, wilayah Asia Timur terdiri dari negara-negara Asia-Cina yakni Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, termasuk wilayah administratif (Hongkong, Makau, dan Tibet). Beberapa negara tersebut sedikit banyaknya memiliki interaksi dan hubungan yang kompleks dengan China baik dalam

masalah konflik wilayah perbatasan, urusan kerjasama keamanan, politik, dan ekonomi yang membentuk dinamika keamanan regional dan memiliki hubungan yang penting dengan negara China, terutama bagi negara-negara dengan kekuatan militer yang besar yakni Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Batasan geografis kawasan Asia Timur dapat dilihat dalam peta berikut.

Gambar 4.1: Batasan Geografis Kawasan Asia Timur



Sumber: Wikivoyage, Map of East Asia's cities, regions and countries.

B. *Anarchic Structure*

Struktur anarki di kawasan Asia Timur terbentuk oleh dua atau lebih unit-unit aktor yang saling berinteraksi, apabila suatu negara mengeluarkan kebijakan keamanan yang provokatif, maka akan memicu respon dari negara lain. Hal ini tentunya menimbulkan permusuhan dan rasa saling curiga antar negara di kawasan, pada akhirnya anarkisme kawasan mengakibatkan minimnya dialog dan kerjasama yang seharusnya dapat dibentuk melalui hubungan bilateral ataupun multilateral (Al-Syahrin 2018, p.92). Struktur anarki dalam kombinasi dengan keterbatasan geografi, bertanggung jawab atas terciptanya kompleks keamanan yang digerakkan secara regional. Setelah beberapa dekade menunjukkan posisi kawasan Asia Timur yang selalu dinamis tanpa adanya rezim keamanan, pengaruh modernisasi militer China menjadi salah satu landasan yang mengubah sedikit banyaknya lanskap keamanan di kawasan tersebut.

Struktur kekuatan dan parameter interaksi yang menjadi ciri hubungan internasional di kawasan sedikit demi sedikit berubah akibat bangkitnya kekuatan ekonomi dan militer China khususnya dalam tahap modernisasi militer, sehingga dalam periode mendatang karakteristik hubungan negara-negara besar di Asia Timur akan terus diwarnai oleh respon terhadap kebangkitan China yang merupakan sebuah fenomena untuk menggambarkan kebangkitan suatu kekuatan baru di kawasan Asia Timur (Shambaugh 2005, p.1). Bagi kondisi anarki kawasan, modernisasi militer oleh tiap bagian PLA menunjukkan upaya China dalam mengerahkan kekuatan baru yang secara fundamental akan mengubah persepsi keamanan di kawasan dan merangsang respon militer yang lebih luas di antara negara-negara besar seperti adanya peningkatan tren belanja militer kawasan. Dinamika tersebut akan menghasilkan ketegangan dan ketidakstabilan regional, sehingga memerlukan upaya politik, diplomatik, dan militer yang lebih kuat dan terkoordinasi untuk mengendalikannya.

Konstelasi Persaingan Hegemoni di Kawasan Asia Timur

Amerika Serikat sebagai salah satu hegemoni *status quo* di kawasan diharapkan dapat memainkan peran penting, namun adanya pergeseran kekuatan dari Amerika Serikat yang menjadi *security order* di kawasan terancam dengan posisi militer China yang semakin mapan. Hadirnya China sebagai *counter-hegemony* merupakan sebuah respon yang dipicu oleh rentannya keamanan kawasan Asia Timur, seperti sikap Amerika Serikat yang ingin *rebalancing* China di kawasan, aliansi Amerika Serikat dan Jepang yang semakin kuat, dan keinginan China untuk melindungi kawasan-kawasan sengketa sebagai wilayahnya, seperti di Selat Taiwan, Laut China Timur, dan Laut China Selatan. Maka dari itu, penting bagi China untuk meningkatkan pertahanannya untuk mempersiapkan diri dari berbagai ancaman.

Konstelasi persaingan antara China dan AS yang saat ini saling berupaya untuk menyebarkan pengaruh dan menjaga stabilitas menjadi kekuatan regional menimbulkan efek dan respon bagi negara-negara dengan kekuatan militer menengah di Asia Timur. Sebagai faktor utama yang menentukan tatanan regional Asia Timur yang muncul saat ini, pendekatan dari struktur anarki menjelaskan tanggapan negara sekunder terhadap kebangkitan militer China. Modernisasi militer China menyebabkan kemampuan China yang relatif lebih besar mampu melemahkan kemampuan militer AS yang saat ini berupaya mempertahankan

aliansinya di negara-negara kawasan. Kekhawatiran baru akhirnya timbul dari negara-negara sekunder di kawasan, sebab kekuatan militer mereka belum seimbang melawan kekuatan China sekalipun dengan meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat.

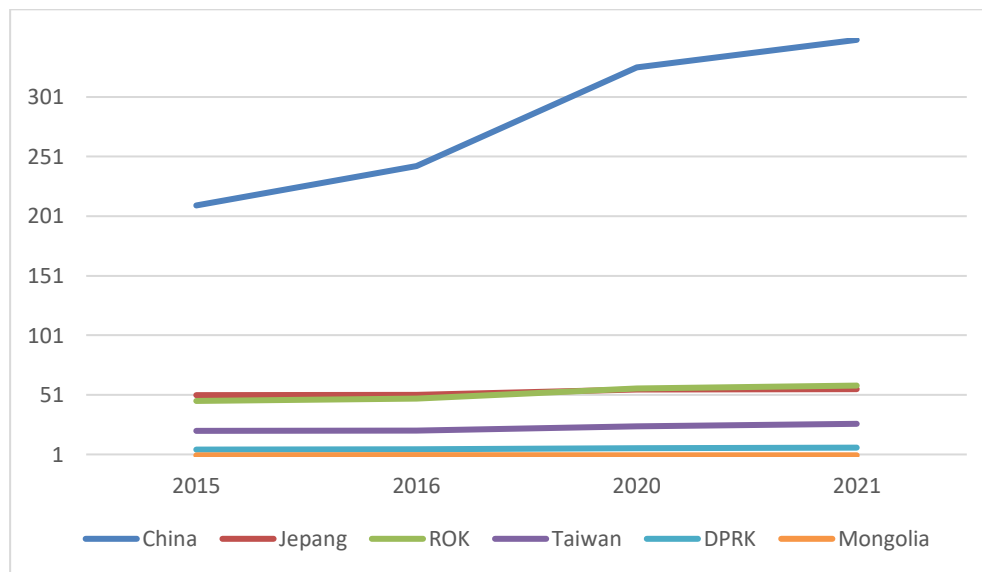
Di samping itu, seiring dengan kebangkitan ekonomi China disertai dengan peningkatan kekuatan militer relatif China, superioritas China atas tetangga terdekatnya telah melebar. Sebuah skema dalam tren ini adalah kemampuan Cina dibandingkan dengan Korea Selatan dan Jepang yang mencerminkan aliansi dengan Amerika Serikat terasa tidak seimbang dengan keberpihakan aliansi antara Korea Utara dengan China, sehingga penguatan kapabilitas militer China mampu memberikan pengaruh di seluruh Semenanjung Korea. Peningkatan kekuatan China ini mencerminkan peningkatan kekuatan darat atas China, perubahan politik di China, dan harapan akan perubahan politik di Semenanjung Korea. Peningkatan kemampuan militer China telah memungkinkan tentara PLA untuk bersaing dengan kekuatan yang lebih baik di mana saja di daratan Asia Timur, termasuk Semenanjung Korea. Ketika kekuatan China tumbuh dan aktifitas China menyebar ke luar Asia, Amerika Serikat semakin tidak dapat melihat China hanya sebagai kekuatan regional. Hal ini menyebabkan keterputusan antara kepentingan global AS dan kepentingan regional AS di kawasan.

Tantangan keamanan regional lain yang menyebabkan isu anarkisme di kawasan juga dipengaruhi oleh sifat hubungan Amerika Serikat dan China, dalam hubungannya dengan Taiwan dan juga bagi aliansi Korea Selatan, Jepang oleh Amerika Serikat, akan sangat menentukan pendekatan China terhadap masalah keamanan regional. Kesediaan China untuk menentang klaim teritorial juga tampaknya menjadi tantangan peningkatan dalam hal struktural karena bertujuan untuk mengubah persyaratan tawar-menawar kekuatan besar termasuk konflik sengketa wilayah Laut China Timur dan Laut bagian Barat. Ancaman nyata China telah membuat Jepang dan Korea Selatan memperluas aliansinya terhadap AS, juga meningkatkan bantuan pertukaran militernya. Peningkatan keterlibatan China dalam urusan keamanan regional melalui modernisasi militernya terhadap negara-negara di kawasan seperti yang dibahas dalam Bab sebelumnya bukanlah momen yang berlalu, namun akan menjadi fitur permanen dari lanskap dan arsitektur keamanan di Asia Timur yang banyak mendominasi dalam beberapa tahun kedepan.

Pergeseran Lanskap Keamanan Kawasan

Perkembangan modernisasi PLA tentu akan memiliki dampak besar pada keseimbangan strategis keseluruhan di kawasan Asia Timur, modernisasi personel militer dan alutsista militer yang dilakukan China bahkan mampu mencakup teknologi canggih seperti kemampuan *C4ISR* (*command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, dan reconnaissance*). Hadirnya kekuatan China tidak hanya dapat mengontrol kekuasaan dan melindungi kedaulatan atas wilayahnya sendiri, namun sekaligus untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya dalam menghadapi ancaman dan konflik di kawasan. China ingin menciptakan modernisasi militer yang mampu memproyeksikan kekuatannya di seluruh domain baik PLAA, PLAN, PLAAF, PLARF dengan kombinasi personel militer yang telah terlatih, akibatnya modernisasi militer menimbulkan peningkatan kekuatan militer negara-negara kawasan sehingga menghasilkan dilema keamanan yang dihadapi oleh China dan tetangganya, kondisi ini disebabkan oleh China yang mengadopsi taktik penyeimbang sementara negara-negara di sekitarnya membangun taktik dan tindakan penyeimbang terhadap China. Kekhawatiran ini mendorong negara-negara di Asia Timur untuk melakukan peningkatan anggaran belanja militer.

Diagram 4.1 Pengeluaran Belanja Militer di Kawasan Asia Timur 2015-2021 (Miliar USD)



Sumber: Lowy Institute Asia Power Index 2021, Military Expenditure Defence Sector PP

Diagram diatas menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Asia Timur terus meningkatkan anggaran belanja dan pertahanan militernya sebagai respon dari peningkatan anggaran militer China. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz bahwa upaya *balance of power* muncul saat kekuatan-kekuatan besar meningkatkan kemampuan mereka, sebagai tanggapan atas meningkatnya kekuatan besar lainnya, dilema keamanan pada akhirnya mendorong negara-negara untuk merespons kemampuan negara lain (Waltz 1979, p.98). Dalam hal ini, China tidak lagi sama dengan beberapa dekade yang lalu, kekuatan militer China termasuk kekuatan yang paling besar di kawasan, dengan penambahan anggaran militer yang tinggi setiap tahunnya mencapai 6,8% dibandingkan negara-negara lain di kawasan yakni Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Mongolia.

Kompleksitas kebangkitan militer dan ekonomi China pada akhirnya mampu menggeser lanskap keamanan kawasan. Respon negara di kawasan menunjukkan bahwa negara-negara menjadi lebih rentan terhadap kekuatan militer China yang mengakomodasi kebangkitan China. Dimana kebangkitan China bergantung kepada pengembangan ketergantungan ekonomi Cina, sementara negara di kawasan juga memiliki hubungan ketergantungan ekonomi yang besar dengan negara China. Bagi Korea Selatan dan Taiwan, dua aktor Asia Timur yang paling rentan terhadap kebangkitan kekuatan militer China, membentuk sekuritisasi dengan China dengan menyesuaikan hubungan pertahanan mereka dengan Amerika Serikat. Secara bersamaan, China menembus masyarakat Korea Selatan dan Taiwan melalui upaya *soft diplomasi* dengan mengembangkan kekuatan lunak dalam interdependensi ekonominya yang mencerminkan tren dari kebangkitan China.

Modernisasi Militer PLA dan Posisi China di Kawasan

Kekuatan China yang telah terbentuk menjadikannya negara yang berpengaruh dalam membentuk hegemoni baru di Asia Timur, keberhasilan modernisasi militer China membuatnya menjadi negara yang paling disegani di kawasan tersebut, sejauh ini China menjadi negara yang paling cocok dalam menekan hegemoni *status quo* yakni Amerika Serikat. Dari sisi doktrin militer, visi dan misi PLA, serta strategi modernisasi militer oleh Xi Jinping memberikan implikasi pada pola serangan dan operasi militer baik PLAA, PLAN, PLAAF, dan PLARF. Seperti dalam modernisasi PLAN China menggunakan komponen

active defense sebagai konsep yang paling strategis agar dalam operasinya, PLAN selalu siap menjaga keamanan territorial di berbagai wilayah. Dalam hal membendung hegemoni AS di Asia Timur, China menjadikan Laut China Timur, Laut China Selatan, dan Selat Taiwan sebagai wilayah fokusnya. Selain itu, China mampu membangun ancaman terhadap cakupan wilayah yang dikenal sebagai *first island chain* dan *second island chain*.

Namun sejauh analisis ini, modernisasi militer China tidak serta merta membawa China menjadi *security provider* baru yang otomatis mampu membentuk rezim keamanan di kawasan. Bahkan jika hadirnya salah satu lembaga yang diperhitungkan seperti ARF (*ASEAN Regional Forum*) belum mampu membendung anarkisme kawasan yang terjadi. Asia Timur masih membutuhkan sebuah rezim keamanan yang solid sementara lembaga-lembaga dan forum di Asia yang telah dibentuk saat ini hanya menyediakan wadah berdialog antar negara di kawasan yang bertujuan untuk CBM (*confidence building measure*). CBM sendiri adalah sebuah tindakan yang mencerminkan niat baik atau kesediaan untuk bertukar informasi dengan musuh. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mengurangi kesalahpahaman, ketegangan, ketakutan, kecemasan, dan konflik antara dua pihak atau lebih dengan menekankan kepercayaan dan membatasi eskalasi konflik sebagai bentuk diplomasi preventif (Harman, 2016).

Bagi anarkisme kawasan, modernisasi militer China belum mencapai tahapan sebagai penjaga stabilitas di kawasan, sebab karakteristik regionalisme di Asia Timur telah dibangun di atas saling ketergantungan ekonomi, kebebasan navigasi, dan aturan perdagangan bebas, dimana mengandalkan stabilitas global yang selama ini disediakan oleh tatanan internasional liberal yakni disponsori oleh AS. Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan utama dalam membentuk stabilitas dan ketertiban regional yang telah terbentuk di kawasan sejak tahun 1945, posisi AS dengan negara aliansi di kawasan secara tidak langsung membentuk *security interdependence* bagi Korea Selatan, Jepang, maupun Taiwan dari posisi Amerika Serikat di puncak hierarki regional. Dalam hal ini, meskipun China hadir menjadi kekuatan besar yang baru, China tidak mampu menyediakan tatanan hegemonik liberal yang telah ada, jika hal ini dipaksakan maka fondasi regionalisme kawasan Asia Timur bisa menjadi retak. Pada akhirnya struktur anarki ini tidak merubah struktur esensial yang telah terbentuk yakni struktur bipolar yang telah dipegang oleh China dan Jepang di kawasan Asia Timur.

C. *Polarity*

Variabel polaritas menunjukkan distribusi kekuasaan dalam kawasan Asia Timur dengan kutub-kutub kekuatan yang terbagi. Asia Timur saat ini sedang menyaksikan beberapa perkembangan yang mempengaruhi struktur kekuatan regional. Penetrasi kekuatan luar yang mempengaruhi polaritas kekuatan di kawasan selama ini yakni Amerika Serikat sebagai hegemon global sepertinya mulai terkikis oleh kebangkitan Cina, pergeseran sayap kanan Jepang, dan munculnya Korea Selatan sebagai kekuatan menengah (*middle power*). Sebagai reaksi atas modernisasi militer China, Jepang mulai meningkatkan kemampuan militernya sebagai negara *great power* yang dianggap setara dengan kekuatan militer China dengan bantuan dari aliansi militernya yakni Amerika Serikat. Sebagai bagian dari kebijakannya untuk menahan China, Amerika Serikat mendukung persenjataan dan pengembangan militer Jepang. Jepang sedang bersiap-siap untuk berbagai kegiatan militer, termasuk intervensi militer di luar negeri atas nama pertahanan diri kolektif. Namun, pembangunan militer Jepang yang cepat menimbulkan ancaman keamanan baru bagi China dan Korea Selatan. Cina dan Korea Selatan memandang pergerakan militer Jepang sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali imperialisme agresif (Goh 2019, p.614).

Bagi sistem bipolar yang telah terbentuk di kawasan Asia Timur pasca perang dingin, Jepang berusaha untuk menyeimbangkan dan melawan kebangkitan hegemonik China, untuk itu Jepang bersedia mengorbankan hubungannya dengan Korea Selatan untuk memobilisasi total Jepang. Hubungan antara Korea dan Jepang memang telah berada pada titik terendah karena kedua negara gagal mempersempit perbedaan mereka atas isu-isu yang berkaitan dengan pengakuan sejarah, buku teks sejarah, wanita penghibur, dan sengketa wilayah (Garcia 2016, p.538). Meskipun Jepang dan Korea Selatan memiliki aliansi bersama mereka dengan Amerika Serikat, Korea Selatan tetap merasa terancam oleh perluasan peran keamanan Jepang. Selain itu, meskipun saling curiga terhadap Jepang, Korea Selatan juga berusaha untuk tetap berhati-hati dengan modernisasi militer China. Disisi lain, modernisasi militer China menimbulkan ancaman bagi aliansi AS-Jepang, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait ancaman PLARF dan sistem senjata ofensif yang dikembangkan China. Ancaman asimetris dan ancaman dari sistem senjata mampu membuat China untuk

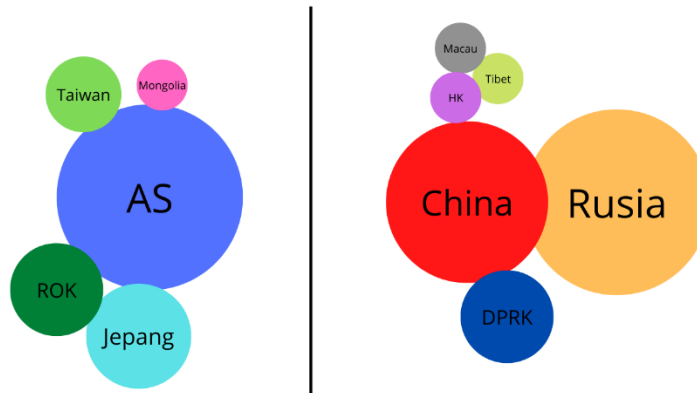
mencegah Amerika Serikat dan Jepang menggunakan domain siber dan ruang angkasa dalam keadaan darurat.

Sementara itu dengan kemajuan modernisasi militernya, China mulai berupaya untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara dan mulai berperan dalam restrukturisasi semenanjung Korea di masa depan dalam pembentukan tatanan baru di dalam dan sekitar kawasan (Kim 2014, p.4). Bagi Korea Utara, modernisasi yang dilakukan China, pengembangan aliansi Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat tentu membuat Korea Utara khawatir dengan keamanan militernya. Saat ini upaya pengembangan nuklir Korea Utara bukan tanpa alasan, upaya *balance of power* dengan memperkuat kekuatan dan kapabilitas militernya dengan senjata nuklir dan peluru kendali merupakan jawaban untuk membendung tekanan kekuatan dari negara-negara militer besar di kawasan.

Distribusi kekuatan di kawasan Asia Timur saat ini mengacu oleh dampak kebangkitan China dan perilaku penyeimbangan kekuatan besar pada keberpihakan negara-negara di kawasan, peningkatan militer dan modernisasi yang terjadi sebagai tren kawasan menimbulkan resiko konflik yang tinggi yang selaras dengan kekuatan besar *status quo*. Peningkatan kemampuan militer China dan dampaknya terhadap keseimbangan regional dan keberpihakan negara-negara di Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan kawasan maritim dalam sistem yang terpolarisasi mengakibatkan mencuatnya isu-isu keamanan regional seperti kepentingan strategis kekuatan besar *vis-à-vis* pihak ketiga, impor senjata, perencanaan pertahanan, aliansi militer, serta kenaikan anggaran belanja militer.

Bahkan meskipun mungkin tidak ada aliansi atau perlombaan senjata di Asia Timur, adanya kebijakan militer kekuatan besar seperti China dan AS serta kebijakan penyesuaian negara kawasan akan tetap menghasilkan polarisasi kekuatan untuk saling menyeimbangkan kekuasaan dengan upaya *hard balancing*. Menyadari kontestasi keamanan China, situasi keamanan di Asia Tengah menjadi terfokus dengan berfokus pada hubungan kompetitif antara AS dan China. Negara-negara kawasan selain AS dan China bertindak untuk menjadi penyeimbang dan secara tidak langsung terlibat. Peran Jepang di kawasan juga adalah untuk menyeimbangkan langkah China di ECS. Jepang memandang nasib isu Senkaku terkait erat dengan hasil sengketa maritim di LCS.

Gambar 4.2: Pembagian Polarisasi Kekuatan di Asia Timur



Gambar diatas menjelaskan bahwa struktur bipolar di kawasan terbagi menjadi dua kutub kekuatan dengan hadirnya Amerika Serikat sebagai *outsider penetration* bersama dengan aliansi yang telah terbentuk di kawasan untuk tetap mempertahankan pengaruh AS di kawasan yakni Jepang sebagai *great power*, dan Korea Selatan sebagai *middle power*. Posisi Taiwan dengan keberpihakan aliansinya bersama dengan Amerika menunjukkan kekhawatiran dan ancaman dari China terkait upaya reunifikasi *one china policy*. Kecondongan Mongolia terkait kutub aliansi bersama dengan Amerika dibentuk atas upaya *hedging power* atas China, Mongolia sebagai negara lemah mengupayakan strategi *hedging* untuk mengimbangi ancaman dari Cina. Pada sisi kutub kekuatan lain, selain China terdapat kekuatan besar dari luar kawasan yakni Rusia, yang selama ini memberikan suplai senjata dan membentuk aliansi militer bersama. Sementara negara kawasan yang berada dalam kutub aliansi militer yang sama yakni Korea Utara, dan juga wilayah administratif khusus China seperti Hongkong, Macau, dan Tibet.

Pada akhirnya struktur bipolar yang saat ini telah dipegang oleh China dan Jepang di kawasan Asia Timur belum dapat digeser dengan kekuatan negara lain di kawasan. Modernisasi militer China memberikan kesempatan kepada China untuk menjadi *regional power* di kawasan Asia Timur. Perilaku China dimasa depan dengan bantuan militernya kemungkinan akan condong mengikuti pola realisme agresif dalam menghadapi Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Akibatnya, modernisasi militer China dan perlombaan senjata dengan Jepang kemungkinan akan berlanjut dalam waktu dekat yang akan mempertemukan dua kutub kekuatan di kawasan Asia Timur. Di masa yang akan datang, Korea Selatan yang

memiliki posisi sebagai *middle power* harus membuat pilihan yang sulit untuk terus membangun sekutu dengan Amerika Serikat ataupun terus berkonfrontasi dengan Cina yang saat ini sedang bangkit (Goh 2019, p,614).

D. Social Construction

Pola konstruksi sosial di kawasan Asia Timur dapat dilihat melalui hubungan *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan), variabel tersebut membantu untuk menganalisis bagaimana sebuah negara memandang negara lain dalam kawasan. Pola konstruksi sosial merupakan faktor kunci dalam hubungan antarnegara untuk menginformasikan sejauh mana proses sekuritisasi dan desekuritisasi negara-negara dalam kompleksitas keamanan kawasan (Garcia 2016, p.549). Bagaimanapun, modernisasi militer China memiliki pengaruh bagi hubungan konstruksi sosial yang telah terbentuk sejak lama, namun bukan berarti modernisasi tersebut juga menghilangkan atau merubah pola konstruksi sosial yang telah terbentuk selama beberapa dekade. Hal ini dikarenakan pola *amity-enmity* yang terbentuk memiliki berbagai latar belakang yang kompleks yang dimulai sejak Perang Dunia II hingga Pasca Perang Dingin dan telah terbentuk melalui faktor sejarah yang mempengaruhi persepsi negara dalam memandang negara lain di kawasan. Masing-masing pola tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pola Hubungan Amity

- **China-Korea Utara**

Hubungan aliansi di Asia Timur berangkat dari hubungan antara China dan Korea Utara, kedua negara tersebut memiliki sistem politik yang sama dan kepentingan strategis yang cukup besar dalam hubungan internasional regional. Dukungan China terhadap Korea Utara telah dimulai sejak Perang Korea (1950–1953), saat pasukan China membanjiri Semenanjung Korea untuk membantu sekutu di Utara. Cina telah memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada para pemimpin Korea Utara dan terus membangun hubungan baik terhadap pemimpin Korea saat ini, Kim Jong-un (Rusi Publication, 2004). Hubungan antara Korea Utara dan China mengalami fase naik turun, China telah menganggap stabilitas di Semenanjung Korea sebagai kepentingan utamanya, untuk itu penting menunjukkan bahwa China mendukung upaya denuklirisasi di kawasan. Pengembangan modernisasi

militer China bukan tanpa alasan, China tetap berupaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya, disisi lain China ingin memegang kendali dan memainkan pengaruh besar di kawasan. Seperti yang diungkapkan oleh Jennifer Lind (2018), seorang profesor di Universitas Dartmouth, *“While the Chinese certainly would prefer that North Korea not have nuclear weapons, their greatest fear is regime collapse”*.

Perkembangan hubungan antara China dan Korea Utara terjadi pada Maret 2018, ketika keduanya mengadakan pertemuan rahasia di Beijing yang menandai perjalanan pertama pemimpin Korea Utara ke luar negeri sejak berkuasa. Xi Jinping menggembar-gemborkan tradisi persahabatan antara China dan Korea Utara, dan Kim menegaskan kembali komitmen untuk denuklirisasi dan kesediaan untuk mengadakan dialog dengan Amerika Serikat. Kedua pemimpin itu telah bertemu empat kali lagi, pada Mei 2018, Juni 2018, Januari 2019, dan Juni 2019 (Maizland, 2019). Selama pertemuan terakhir mereka, Xi Jinping disambut di Pyongyang, menandai pertama kalinya seorang pemimpin China mengunjungi Korea Utara sejak 2005. Pertemuan antara Xi Jinping dan Kim Jong Un terjadi saat Korea Utara juga berpartisipasi dalam pertemuan puncak dengan Korea Selatan dan dengan Amerika Serikat. China telah mendesak kekuatan dunia untuk tidak mendorong Korea Utara terlalu keras sehingga memicu aksi militer yang berbahaya. Lalu pada Februari 2022, Xi Jinping menyampaikan sebuah ajakan untuk memerangi ancaman militer AS melalui kerja sama strategis (Zwirko, 2022).

- **Aliansi Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat**

Bagi pola aliansi antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, terlihat hubungan yang begitu kompleks. Hubungan Korea Selatan dan Jepang yang telah tumbuh dengan latar belakang dan konflik yang buruk harus ditutup dengan ancaman keamanan kawasan yang berfungsi untuk menstabilkan hubungan antar negara tersebut. Karena peran AS yang begitu besar dalam membuat netralisasi hubungan diantara kedua negara dan keinginannya untuk melihat hubungan trilateral antara dirinya dan dua mitra regionalnya untuk membendung kekuatan militer terhadap China di Asia Timur. Jelas bahwa hadirnya modernisasi militer China menjadi salah satu ancaman besar bagi aliansi yang telah terbentuk, asumsi dasar bahwa China secara aktif berusaha untuk menjadi hegemon regional, merupakan tantangan yang melekat pada pola aliansi yang dipimpin AS. Menurut *U.S*

Department of State, baik Jepang maupun Korea Utara sebenarnya telah mendukung tatanan liberal yang sebagian besar menjamin perdamaian dan kemakmuran mereka sendiri, oleh karena itu mereka bersedia menjadikan AS sebagai pemimpin aliansi militer sekaligus sebagai pelindung dari kebangkitan China.

Adapun hubungan antara Korea Utara dengan China memperparah dilema keamanan yang ditimbulkan oleh kepentingan keamanan dan strategis AS dan sekutunya. Pengaruh politik dan ekonomi China atas Korea Utara, jika diterapkan secara konsisten akan menimbulkan kekhawatiran AS untuk mengurangi provokasi antara militer China dan Korea Utara. Bagi China, Korea Utara berfungsi sebagai penyangga penting terhadap Amerika Serikat dan sekutu utamanya yakni Jepang dan Korea Selatan, serta sumber pengaruh utama atas aliansi ketiga negara (Dixon, 2021). Pola hubungan unik ini menciptakan dua aliansi yang berbeda antara penguatan aliansi militer China-Korea Utara untuk menekan kekuatan aliansi militer Jepang dan Korea Selatan yang dipimpin oleh AS, arah tujuan aliansi militer ini mampu memperkuat posisi China di kawasan Asia Timur dan menguatkan aliansi satu sama lain untuk saling mendukung. Aliansi AS-Jepang dan AS-ROK dianggap sangat penting untuk menekan konfrontasi atas modernisasi militer China yang berkembang pesat dalam hal keragaman platform, jangkauan, daya mematikan, kemampuan bertahan, dan teknologi persenjataan yang canggih (Harold & Hiroyasu, 2021). Oleh karena itu, hubungan Jepang dan Korea Selatan harus terus direkonsiliasi untuk menghindari runtuhnya aliansi tersebut.

- **Hubungan Militer China-Rusia**

Hubungan antara Rusia dan China tidak secara gamblang ditunjukkan melalui peran Rusia di kawasan. Tidak seperti hegemoni AS yang menunjukkan pengaruh langsung bagi penetrasi kekuatan dari luar kawasan, hubungan Rusia dan China ditunjukkan melalui bantuan militer dan pasokan persenjataan yang telah berlangsung lama pasca perang dingin berakhir. Persenjataan Rusia adalah salah satu hal yang mendorong realisasi bagi modernisasi militer China di kawasan dan kedua negara tersebut terus membangun aliansi militer yang baik hingga saat ini. Walaupun China dan Rusia bukanlah sekutu perjanjian formal, namun mereka menyebut satu sama lain sebagai mitra strategis. Pada Februari 2022, pertemuan antara Xi Jinping Vladimir Putin berlangsung dengan baik hingga saling

mengatakan kemitraan mereka tidak terbatas dan menegaskan untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang (Maizland, 2022).

Awalnya kerja sama militer China-Rusia dimulai pada awal 1990-an ketika kedua negara memulai *confidence building measures* yang bertujuan untuk demiliterisasi dan desekuritisasi perbatasan bersama dan berkembang menjadi mekanisme konsultasi militer reguler yang komprehensif di berbagai tingkatan. Pada pertengahan-akhir 2000-an, perkembangan ini memfasilitasi munculnya kerjasama bilateral dalam bidang teknis militer disertai dengan pertukaran personel militer dan latihan militer reguler. China menjadi mitra istimewa Rusia dalam kerjasama militer (Kuo, 2022). Hal ini berimplikasi terhadap peningkatan kualitas transfer senjata bilateral, kedua negara juga menyiapkan rencana dalam bentuk kerja sama militer yang lebih maju. Hal ini meliputi pengembangan mesin modern, ekspor sistem senjata pesawat canggih, jet tempur supermanuver, dan helikopter militer. Puncak kerja sama militer China-Rusia adalah saat Putin mengumumkan pada Oktober 2019 bahwa Rusia secara aktif membantu China untuk membuat sistem radar peringatan dini serangan rudal, yang diklaim secara fundamental mampu meningkatkan kemampuan pertahanan China. Penguatan mitra strategis militer antara China-Rusia yang lebih erat di mana kedua negara saling memberikan bantuan militer dalam konfrontasi mereka untuk menghadapi kekuatan hegemoni akan memiliki implikasi geopolitik kawasan yang serius.

Pola Hubungan Enmity

- **Sekuritisasi China-Jepang**

Sekuritisasi China atas Jepang merupakan salah satu bentuk perseteruan kedua belah pihak di kawasan atas sengketa teritorial yang sedang berlangsung dengan Jepang. Berdasarkan data dari *The Center for Preventive Action* (2022), ketegangan antara China dan Jepang atas pulau Senkaku/Diaoyu yang diperebutkan terus meningkat karena kedua negara turut meningkatkan kemampuan militer mereka, China bahkan mengembangkan sistem radar dan misil di wilayah tersebut. China memperparah ketegangan dengan meningkatkan kehadiran kapal CCG (*China Coast Guard*) di zona sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Menurut JCG (*Japan Coast Guard*) jumlah kapal resmi China di dalam zona tersebut meningkat secara dramatis mulai April 2019. Mulai dari April 2019 hingga Agustus 2020,

kapal China berada di dalam zona tambahan selama 456 hari, di tahun sebelumnya juga kapal-kapal China berada di zona tersebut yakni pada November 2017 hingga Maret 2019 selama 227 hari (Mochizuki & Han, 2020).

Bagi China, Jepang merupakan salah satu alasan untuk mengembangkan kemampuan militernya, China selalu merasa khawatir dengan upaya normalisasi Jepang dengan memperkuat aliansinya dengan AS dan juga meningkatkan anggaran militernya. China telah mengindikasikan bahwa pengeluaran militer Jepang tidak proporsional dengan ukuran geografis dan populasinya (Zhao, 2022). Eskalasi retorika sekuritisasi antara kedua negara secara langsung berdampak pada keamanan kawasan. Jepang melihat ketegasan China dalam masalah keamanan sebagai ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Hal ini mendorong Jepang untuk melakukan tindakan penyeimbangan dalam bentuk perjanjian kerjasama ekonomi dan pertahanan dengan AS. Di sisi lain, China melihat tindakan Jepang sebagai langkah menuju militerisme dan sebagai strategi penahanan yang bertujuan untuk mengepung China di masa mendatang.

- **Perseteruan China-Taiwan**

Hubungan antara China dan Taiwan yang terus menjadi isu sentral di kawasan Asia Timur. Bahkan China memperkuat dan mempercepat pencapaian modernisasi militernya bukan tanpa alasan, melainkan untuk memenangkan sengketa teritorial dengan Taiwan. China telah menggunakan berbagai taktik pemaksaan melalui tindakan militer yang bertujuan untuk melemahkan Taiwan dan mendorong orang-orang di pulau itu untuk menyimpulkan bahwa pilihan terbaik mereka adalah segera mempercepat reunifikasi dengan China. Untuk itu, China telah meningkatkan frekuensi dan skala patroli pembom PLA, jet tempur, dan pesawat pengintai di sekitar Taiwan. Intensitas China juga semakin tinggi dalam mengarungi kapal perang dan kapal induknya melalui Selat Taiwan untuk unjuk kekuatan (Maizland, 2022). Pada tahun 2021, China tampaknya meningkatkan tekanan dengan mengirim pesawat militer ke Zona Pertahanan Udara Taiwan, jumlah pesawat yang dilaporkan mencapai puncaknya pada Oktober 2021 dengan 56 serangan dalam satu hari (Brown, 2022).

Kekhawatiran utama negara di kawasan adalah bahwa kemampuan dan ketegasan militer China yang berkembang, serta memburuknya hubungan lintas-selat, dapat memicu konflik. Menurut *Department of Defense* AS, PLA sedang mempersiapkan kemungkinan

untuk menyatukan Taiwan dengan China secara paksa, akibat dari modernisasi militer China yang semakin mapan (DoD, 2021). Kemampuan PLARF dalam pengembangan rudal dan misil yang berkembang di Selat Taiwan memberikan kerugian yang pasti bagi Taiwan dalam perang lintas selat. PLA sekarang dapat menjangkau seluruh selat Taiwan dan menargetkan pusat-pusat sipil dan militer Taiwan. Saat ini China sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi konfrontasi dengan Taiwan sembari mengupayakan upaya reunifikasinya, persiapan militer dengan mempertajam dan memperluas kesiapan angkatan PLA dalam setiap domain baik di laut, udara, darat, luar angkasa, maupun dalam perang siber.

China memang telah memutuskan untuk menggunakan instrumen militernya dalam menunjukkan serta membangun kendali China yang berdaulat atas Taiwan. Untuk pertama kalinya sejak konflik yang terjadi antara China dan Taiwan, modernisasi militer China saat ini dapat merusak ekonomi dan demokrasi Taiwan terlepas dari tingkat intervensi militer. Untuk itulah proses sekuritisasi China atas Taiwan menghasilkan pola perseteruan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal ini mengakibatkan dilema keamanan di kawasan Asia Timur, yang memperkuat pola permusuhan, yang akibatnya mengarah pada memburuknya hubungan bilateral dan meningkatnya ketegangan.

Tabel 4.1: Pola Hubungan *Amity-Enmity* antara China dan Negara-Negara RSC

Negara		Pola Hubungan	
		Positif	Negatif
China	Korea Utara	V	
China	Jepang		V
China	Korea Selatan		V
AS	China		V
Taiwan	China		V
China	Rusia	V	

KESIMPULAN

Pengaruh dari peningkatan modernisasi militer China secara aktif membentuk dinamika keamanan regional dengan melonjaknya anggaran belanja militer di kawasan Asia Timur. Melihat respon negara-negara terhadap modernisasi militer China, membuktikan pengaruh China semakin tidak terelakkan di kawasan. Kondisi ini akhirnya memunculkan *security dilemma* bagi negara lain sehingga negara lain yang berada di sekitar kawasan negara tersebut juga akan memperkuat militer yang mereka miliki. Kawasan Asia Timur yang dinamis memberikan respon terhadap kebangkitan militer China yang dapat dipahami dengan melihat struktur dan pola dalam RSCT melalui variabel-variabel di dalamnya dengan menganalisis kerumitan hubungan yang terjadi khususnya pada negara-negara kunci yakni China, Jepang, Taiwan, Korea Utara, dan Korea Selatan dengan mengukur masing-masing negara yang memiliki kapabilitas militer yang mumpuni.

Bagi struktur anarki, modernisasi militer China akan mengubah persepsi keamanan di kawasan dan merangsang respon militer yang lebih luas di antara negara-negara besar, dinamika tersebut akan menghasilkan ketegangan dan ketidakstabilan regional. Keberhasilan modernisasi militer China membuatnya menjadi negara yang paling disegani di kawasan tersebut, sejauh ini China menjadi negara yang paling cocok dalam menekan hegemoni *status quo* yakni Amerika Serikat. China mampu membangun ancaman baru di kawasan. Namun modernisasi militer China belum mencapai tahapan sebagai penjaga stabilitas di kawasan. Pada akhirnya struktur anarki ini tidak merubah struktur esensial yang telah terbentuk yakni struktur bipolar yang telah dipegang oleh China dan Jepang di kawasan Asia Timur. Kemudian bagi konfigurasi polaritas, posisi hegemon global mulai terkikis oleh kebangkitan Cina. Perilaku China dimasa depan dengan bantuan militernya kemungkinan akan condong mengikuti pola realisme agresif dalam menghadapi Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Pada akhirnya China menjadi kekuatan regional baru sementara struktur bipolar yang saat ini telah dipegang oleh China dan Jepang di kawasan Asia Timur belum dapat digeser dengan kekuatan negara lain di kawasan.

Variabel kontruksi sosial yang mencakup pola hubungan *amity* dan *enmity*, pola hubungan emity dibuka dengan hubungan antara China dan Korea Utara, kedua Negara tersebut memiliki kerjasama strategis militer yang cukup unik untuk membendung kekuatan

AS di kawasan. Bagi aliansi lainnya yakni antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, terlihat hubungan yang begitu kompleks untuk membendung kekuatan militer terhadap China di Asia Timur. Jelas bahwa hadirnya modernisasi militer China menjadi salah satu ancaman besar bagi aliansi yang telah terbentuk. Pola hubungan unik ini menciptakan dua aliansi yang berbeda antara penguatan aliansi militer China-Korea Utara untuk menekan kekuatan aliansi militer Jepang dan Korea Selatan yang dipimpin oleh AS. Lalu dalam pola hubungan enmity, perseteruan China atas Jepang dibuka dengan masalah sengketa. Eskalasi retorika sekuritisasi antara kedua negara secara langsung berdampak pada keamanan kawasan. Hubungan antara China dan Taiwan juga semakin parah dengan konfrontasi militer yang telah terjadi di Selat Taiwan. Hal ini mengakibatkan dilema keamanan di kawasan Asia Timur yang memperkuat pola permusuhan.

Pada akhirnya modernisasi militer China memang memberikan pengaruh terhadap kompleksitas keamanan di Asia Timur, dimana secara khusus mengubah lanskap keamanan yang telah terbentuk pasca perang dingin. Di bawah pemerintahan Xi Jinping, modernisasi militer China semakin tidak terelakkan dan menjadi salah satu kekuatan dalam mempengaruhi isu-isu sentral di kawasan Asia Timur. Di masa yang akan datang, China akan menjadi salah satu kekuatan regional sekaligus kekuatan global yang pengaruhnya tidak terelakkan. Kajian-kajian regional nantinya diharapkan mampu menganalisis upaya-upaya China dan juga perilaku aktor negara yang memegang peran penting dalam pembuatan kebijakan sebagai bentuk konsistensi China bagi kekuatan militernya untuk menjadi negara dengan militer kelas dunia pada tahun 2049, sebagai salah kekuatan di kawasan dan pesaing hegemon *status quo*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. N. (2018). "Keamanan Asia Timur" Komoyo Press.
- Amanda, E. (2018). "Yes, Kim Jong Un met President Trump. But China is still North Korea's most important ally. The Washington Post (2018).
<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/06/21/yes-kim-jong-un-met-president-trump-but-china-is-still-north-koreas-most-important-ally/>
- Bader, J. A. (2016). "A Framework for U.S. Policy Toward China".
<https://www.brookings.edu/research/a-framework-for-u-s-policy-toward-china/>.

- Buzan, B., and Hansen, L. (2009). *The evolution of international security studies*. Cambridge University Press.
- Buzan, B., Buzan, B. G., W'ver, O., Waever, O., & Buzan, O. W. B. (2003). *Regions and powers: the structure of international security* (Vol. 91). Cambridge University Press.
- Centre for Economics and Business Research (2022). *Chosun Ilbo – China's Economy Could Overtake U.S. Economy by 2030*. <https://cebr.com/reports/trt-world-chinas-economy-surpasses-the-european-unions-for-the-first-time/>
- David, B. (2022). "China and Taiwan: A really simple guide". BBC News <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139>
- Department of Defense (DoD), (2021). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021*.
- Duchâtel, M., Bräuner, O., & Seibel, K. (2016). "7. Trends in East Asian security." *SIPRI Yearbook*. SIPRI. Oxford: Oxford University Press.
- Flick, U. (2009). "Qualitative and Quantitative Research", *An Introduction to Qualitative Research*. London: SAGE, pp. 23-34.
- Fröhlich, S., & Loewen, H. (2018). *The Changing East Asian Security Landscape*. Springer.
- Garcia, Z. (2016). "Power Cycles and Security Complexes: Evolution of the East Asian Supercomplex." *Asian Politics & Policy* 8.4: 538-558.
- Goh, E. (2019). "Contesting Hegemonic Order: China in East Asia." *Security Studies* 28.3: 614-644.
- Harold, S., Hiroyasu, A., Hornung, J. W., Kim, S., & Sakata, Y. (2021). *The US-Japan Alliance and Rapid Change on the Korean Peninsula: Proceedings from a Pair of Conferences*. RAND.
- Jonatha, D. (2021) "Old Enemies, New Friends: Repairing Japanese-Korean Relations and Moving to a Networked Approach Towards America's Alliance" <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2021/8/31/old-enemies-new-friends-repairing-japanese-korean-relations-and-moving-to-a-networked-approach-towards-americas-alliance>
- Jujun S. (2005). *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kuo, M.A (2022). "How China Supplies Russia's Military. The Diplomat
- Kim, E. (2014). "Rising China and Turbulent East Asia: Asianization of China?" *Pacific Focus* 29.1: 1-7.
- Lowy Institute Asia Power Index (2021). *Military Expenditure Defence Sector PP*, dalam <https://power.lowyinstitute.org/data/military-capability/defence-spending/military-expenditure-market-exchange-rates/>
- Maizland, L. (2020). "China's Modernizing Military". <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-modernizing-military>

- Maizland, L. (2022). "Why China-Taiwan Relations Are So Tense". Council on Foreign Relations <https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden>.
- Mochizuki, M., & Han, J. (2020). "Is China Escalating Tensions with Japan in the East China Sea? The Diplomat" <https://thediplomat.com/2020/09/is-china-escalating-tensions-with-japan-in-the-east-china-sea/>
- National Online Project, "Asia Map". Diakses secara daring melalui https://www.nationsonline.org/oneworld/asia_map.htm
- Rafsanjani, L. A., Karjaya, L. P., & Rizki, K. (2020). "Rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China dalam Menjadi Security Orderer di Asia Timur." *Indonesian Journal of Global Discourse* 2.1: 27-44.
- Rusi Publication, (2004). "Sino-North Korean Military Relations: Comrades-in-Arms Forever?" melalui <https://rusi.org/publication/sino-north-korean-military-relations-comrades-arms-forever>.
- Segal, Gerald "China Changes Shape: Regionalism and Foreign Policy, London: International Institute of Strategic Studies Adelphi (1994), p. 31
- Teks pidato lengkap Xi Jinping Perayaan 100 Partai Komunis China. (2021). <https://asia.nikkei.com/Politics/Full-text-of-Xi-Jinping-s-speech-on-the-CCP-s-100th-anniversary>
- The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China*, (1990) https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/images/basiclaw_full_text_en.pdf
- The Center for Preventive Action. (2022). "Tensions in the East China Sea" <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/tensions-east-china-sea>.
- The World Bank Data. (2022). "Military expenditure (current USD) - East Asia & Pacific". <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=Z4>
- U.S Department of State. (2022). "Joint Statement on the U.S.-Japan-Republic of Korea Trilateral Ministerial Meeting". <https://www.state.gov/joint-statement-on-the-u-s-japan-republic-of-korea-trilateral-ministerial-meeting/>
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Addison Wesley.
- Wikivoyage. (2022). Map of East Asia's cities, regions and countries, diakses secara daring https://en.wikivoyage.org/wiki/East_Asia
- Wuthnow, J. (2020) "China's Military Modernisation". <https://www.eastasiaforum.org/2020/12/16/chinas-military-modernisation/>
- You, J. (2018). "Xi Jinping and PLA Transformation Through Reforms". RSIS Working Series, <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/05/WP313.pdf>
- Zwirko, C. (2022). "North Korea and China cooperating to fight US military threat: Kim Jong Un" NK News <https://www.nknews.org/2022/02/north-korea-and-china-cooperating-to-fight-us-military-threat-kim-jong-un/>

LAMPIRAN

Naspub 1 : Analisis Pengaruh Modernisasi Militer China Era Pemerintahan Xi Jinping terhadap Kompleksitas Keamanan di Asia Timur

by Andi Fitria Nuur Khasanah

Submission date: 05-Oct-2022 10:18AM (UTC+0800)

Submission ID: 1916958934

File name: NASKAH_PUBLIKASI_ANDI_FITRIA_NK.docx (359.24K)

Word count: 8532

Character count: 57213

Naspub 1 : Analisis Pengaruh Modernisasi Militer China Era Pemerintahan Xi Jinping terhadap Kompleksitas Keamanan di Asia Timur

ORIGINALITY REPORT

25%	23%	4%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4%
2	files.osf.io Internet Source	2%
3	ic-mes.org Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.amikom.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	ijgd.unram.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Australian National University Student Paper	1%

Submitted to UC, Irvine